

**SISTEM PENGENDALIAN INTERM PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE**



**SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sigli, 27 Desember 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pidie



FIRMAN MAULANA, S.STP, M.A.P

Pembina Tk. I

Nip. 19791212 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP.....	3
A. Pengertian SPIP.....	3
B. Tujuan SPIP	3
C. Unsur-unsur SPIP	4
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	5
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	7
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	7
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	7
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	8
BAB IV. PENILAIAN RISIKO DAN TINDAK PENGENDALIAN	13
A. Pernyataan Tujuan	13
B. Risiko-risiko.....	13
C. Kegiatan Pengendalian yang Telah dilakukan	17
D. Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan	18
E. Kegiatan Pengendalian yang Harus Ada	19
F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Tahun Lalu.....	19
BAB V. PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form Identifikasi Risiko	23
Lampiran 2	Form Perhitungan Rata-Rata Skala Kemungkinan	25
Lampiran 3	Form perhitungan skala dampak	27
Lampiran 4	Form Analisis Risiko	29
Lampiran 5	Peta Risiko	31
Lampiran 6	Form Risiko dan Pengendaliannya	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di atas adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindakpengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie sehingga diharapkan

dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RTP SPIP tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam hal menciptakan lingkungan pengendalian yang baik serta pelaksanaan penilaian resiko yang memadai.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya dokumen RTP ini adalah untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024.

C. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian ini melibatkan seluruh jajaran mulai dari level pimpinan hingga staf.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

C. Unsur-Unsur SPIP

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern. Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti

membangun dan menciptakan suatu "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis,

dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Pidie sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBK telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana Tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan pengembangan SDM	Kurang Memadai
7	Pengawasan internal yang efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi regulasi tentang Pesan Integritas & Nilai Etika di lingkup internal instansi

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
		Menyusun regulasi yang mengatur tentang pendapatan/tunjangan berbasis kinerja
		menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan harus disosialisasikan kepada seluruh ASN
II	Komitmen terhadap Kompetensi	menyusun SOP tentang Penilaian Kompetensi Pegawai
		membuat peta kompetensi pegawai
		mendokumentasikan tentang prosedur penilaian Kompetensi Pegawai
III	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	- membuat kajian analisa resiko terhadap struktur organisasi
		- memfasilitasi dan mengagendakan rapat dalam rangka evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi organisasi di semua jajaran instansi
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	membuat dokumen tentang pendelegasian/pelimpahan kewenangan dalam instansi sesuai dengan aturan yang berlaku
		memfasilitasi dan mengagendakan rapat dalam rangka review secara periodik terhadap kewenangan dan pelimpahan kewenangan

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
V	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	memprioritaskan program/kegiatan menyangkut pendidikan dan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensinya

BAB IV

PENILAIAN RISIKO DAN TINDAK PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Pidie
2. Meningkatnya Persentase Persetujuan/ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan pemerintah.
3. Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
4. Meningkatnya pengelolaan lumpur tinja

B. Risiko-Risiko

Level risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dari sisi kemungkinan dan dampak dapat diuraikan sebagai berikut :

Level Risiko	Kemungkinan
1 (Jarang Sekali)	Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan
2 (Jarang)	Mungkin terjadi sekali dalam 5 Tahun
3 (Sering)	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4 (Sangat Sering)	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Level Risiko	Dampak
1 (Rendah Sekali)	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
2 (Rendah)	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang/ cukup signifikan
3 (Tinggi)	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi dan mengganggu pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
4 (Tinggi Sekali)	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sangat tinggi dan mengganggu pelayanan lebih lebih dari 1 minggu

Dari hasil penilaian risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, diketahui bahwa profile risiko adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

Risiko atas pencapaian Tujuan 1 : Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Pidie adalah:

- Hasil perhitungan IKA tidak sesuai dengan target.
- Kerusakan yang mungkin terjadi pada peralatan pengujian laboratorium lingkungan

Risiko atas pencapaian Tujuan 2 : Meningkatnya Persentase Persetujuan/ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan pemerintah adalah:

- Terkendalanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
- Minimnya fasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan kewenangan kabupaten/kota.

Risiko atas pencapaian Tujuan 3 : Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah:

- Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan tidak mencapai target.
- Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat tidak mencapai target.
- Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH tidak mencapai target.

Risiko atas pencapaian Tujuan 4 : Meningkatnya pengelolaan lumpur tinja adalah:

- Jumlah penyedotan Tinja yang tidak maksimal.

- Target capaian Persentase Pengelolaan Sampah agak sulit untuk dicapai.
- Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana pengangkutan lumpur tinja.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan *focused group discussion* kepada responden secara acak kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie. Hasil analisa 12 risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		0
2	Tinggi		1
3	Sedang		5
4	Rendah		4

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

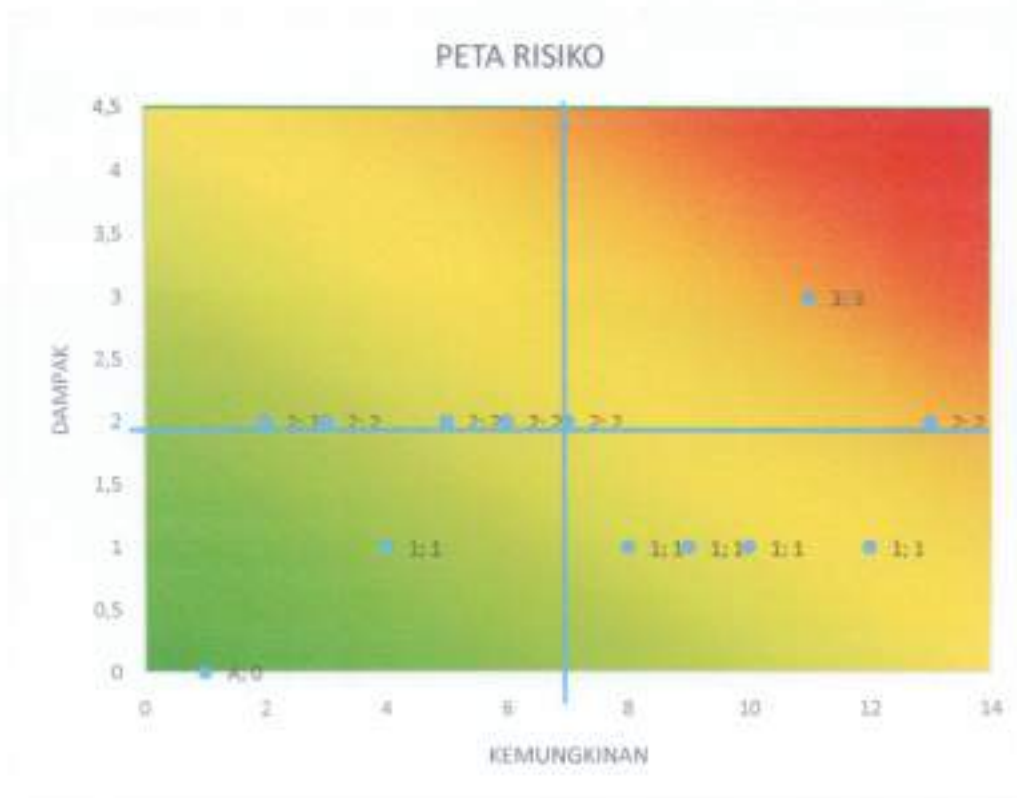
- Terdapat 0 Risiko dengan kategori "sangat tinggi".
- Terdapat 1 Risiko dengan kategori "tinggi" yaitu risiko nomor 4a
- Terdapat 6 resiko yang mempunyai level sedang yaitu risiko nomor 1a, 2a, 2b, 2c, 4b.
- Tidak terdapat resiko yang mempunyai level rendah yaitu risiko nomor 1b, 3b, 3c. 4c.

Rincian analisis resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie dapat dilihat pada

Lampiran II

3. Peta Resiko

Hasil analisis atas risiko-risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie memperlihatkan peta risiko sebagai berikut:



C. Kegiatan Pengendalian yang telah dilakukan

Sampai dengan saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie telah membangun berbagai pengendalian dalam mengatasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif untuk mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Draf SK Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan, Rancangan RAB.
2. Proses permintaan data untuk keperluan penyusunan IKPLHD melalui surat resmi Dinas .
3. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di Laboratorium Lingkungan DLH umumnya sudah tersedia

4. Kesiapan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di Laboratorium Lingkungan DLH yang sudah terakreditasi KAN
5. Draf SK Admin Aplikasi/ Sistem Informasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik
6. Penyampaian secara lisan, Form Check List dan penandatanganan BA Pengawasan
7. Draf SK Panitia Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
8. Pencatatan harian jumlah sampah yang ditangani, perawatan berkala kendaraan angkut sampah
9. Data untuk inputan SIRUP LKPP untuk rincian paket tahun 2024
10. Melakukan perawatan berkala kendaraan angkutan sampah

D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Adapun pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie untuk ke depannya adalah :

1. Daftar Instansi/ Lembaga yang punya relevansi dengan pemanfaatan RPPLH
2. Pendekatan lebih personal kepada pejabat/ pengelola data di Instansi Dinas terkait dengan kebutuhan data untuk penyusunan IKPLHD Tahun 2024
3. Mengirimkan sampel untuk 2 parameter yang belum bisa diuji di Lab DLH ke Lab lainnya di Banda Aceh terkait dengan Perhitungan IKA
4. Memastikan perawatan peralatan dan kalibrasi, penyediaan bahan kimia dan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pengujian di Laboratorium Lingkungan DLH
5. Mengupayakan anggaran untuk rehab taman dan penggantian pot yang rusak pada perubahan anggaran tahun 2024,
6. Peningkatan kapasitas SDM DLH yang terkait dengan urusan perizinan dan pengelolaan LB3

7. Setiap temuan tim pengawas LH harusnya ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan di periode pengawasan selanjutnya
8. Keseriusan Pemkab Pidie dalam menindak usaha kegiatan yang tidak memiliki izin
9. Penambahan ritase angkutan untuk antisipasi, Mengupayakan penambahan armada baru pada melalui berbagai sumber dana, Membina hubungan dengan para pihak terkait dengan pengurangan sampah
10. Brosur, Harga Pembanding, Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dll
11. Pengawasan, Pendataan Penyedia jasa penyedotan tinja swasta, Koordinasi pengelolaan paska penyedotan serta data hasil penyedotan.

E. Kegiatan Pengendalian yang Harus Ada

Adapun kegiatan pengendalian yang harus ada antara lain Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerjadalamlingkunganDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie selaku pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian

1. Monitoring dan evaluasi untuk semua resiko setiap triwulanan
2. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk semua resiko setiap triwulanan

F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Tahun Lalu

Pelaksanaan RTP Tahun 2023 berjalan sangat baik, namun capaian target sampai saat RTP ini disusun masih dalam proses perhitungan bersamaan dengan penyusunan LKjIP Tahun 2023.

Namun untuk pelaksanaan RTP Tahun 2022 pelaksanaan berjalan cukup efektif, dimana rata-rata capaian target :

1. Persentase capaian output sub kegiatan, yaitu 98,94 persen;
2. Persentase capaian Perjanjian Kinerja adalah 128,28 persen;
3. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama adalah 147,88 persen;
4. Persentase capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD) adalah 121,55 persen;
dan
5. Persentase realisasi anggaran pendapatan melalui PAD yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah 69,59 persen

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan. Pada akhir tahun 2024 pelaksanaan SPIP di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian ini akan dievaluasi lebih lanjut.

Komitmen dari para pimpinan dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko

Sigli, Desember 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pidie



FIRMAN MAULANA, S.STP, M.A.P
Pembina Tk. I
Nip. 19840901 200212 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Program	Tujuan Program	No	Risiko		Pembik	Penyebab		Sumber	C/UC	Dampak	
				Urutan	4		Urutan	6			Urutan	Pihak yang Terkena
1	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya pengelolaan lumpur tinja	1	Jumlah pemeliharaan penyedotan Lumpur Tinja yang menurun	Sidang PSUB/3K	Menurunnya pesanan penyedotan tinja dan tahun ke tahun, adanya jasa penyedotan tinja ilegal, Pengawasan internal kurang, Dukungan sarana dan prasarana penyedotan lumpur tinja yang terbatas.	Internal dan Eksternal	7	Tingkat Pensefektifan Cokupan pengabdian lumpur tinja sulit untuk dicapai	8	9	Seluruh komponen baik pemerintahan dan stakeholder
				Tingkat capaian Pensefektifan Pengelolaan Sampah sulit untuk dicapai	Bidang PSUB/3K	Dukungan sarana dan prasarana pengabdian sampah baik berupa sarana dan prasarana penanganan maupun penanganan sampah terbatas	Internal dan Eksternal		Jumlah sampah yang tidak terkumpul masih tinggi	C		Seluruh komponen baik pemerintahan dan stakeholder
				Keterlambatan Pelaksanaan Pengabdian Sarana pengangkutan lumpur tinja	Bidang PSUB/3K	Terdapatnya elusiusi jeket pengabdian Sarana Pengangkutan	Internal dan Eksternal		Proses Pengadaan sarana pengangkutan lumpur tinja mengalami keterlambatan pelaksanaan	C		Seluruh komponen baik pemerintahan dan stakeholder

Ditulis oleh :
Direview oleh :

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Dinas : Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

No	Program	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta				Skor Skala Rata-rata
			A	B	C	4	
1	2	3					5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan IKA tidak sesuai dengan target	2	2	2		2
		Kerusakan yang mungkin terjadi pada peralatan pengujian laboratorium lingkungan	1	1	1		1
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	Terkendalanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	2	2	2		2
		Minimnya fasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan kewenangan kabupaten/kota	1	1	1		1
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan tidak mencapai target	1	1	1		1
		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat tidak mencapai target	1	1	1		1
		Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH tidak mencapai target	1	1	1		1

No	Program	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta			Skor Skala Rata-rata
			A	B	C	
1	2	3	4			5
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah permintaan penyedotan Lumpur Tinja yang menurun Target capaian Persentase Pengelolaan Sampah sulit untuk dicapai Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana pengangkutan lumpur tinja	2	2	2	2
			2	2	2	2
			1	1	1	1

Disusun oleh :
Direview oleh :

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak

Dinas : Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

Tujuan :

No	Program	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta			Skor Skala Rata-rata
			A	B	C	
1	2	3	4			5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan IKA tidak sesuai dengan target	2	2	2	2
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya	Kerusakan yang mungkin terjadi pada peralatan pengujian laboratorium lingkungan Terkendalanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Minimnya fasilitas pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan kewenangan kabupaten/kota Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan tidak mencapai target	1	1	1	1
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyaluran Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat tidak mencapai target Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH tidak mencapai target	2	2	2	2
			1	1	1	1

No	Program	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta			Skor Skala Rata-rata
			A	B	C	
1	2	3	4			5
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah permintaan penyedotan Lumpur Tinja yang menurun	3	3	3	3
		Target capaian Persentase Pengelolaan Sampah sulit untuk dicapai	2	2	2	2
		Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana pengangkutan lumpur tinja	1	1	1	1

Disusun oleh :
Direview oleh :

Lampiran II

Formulir Analisis Risiko
Dinas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

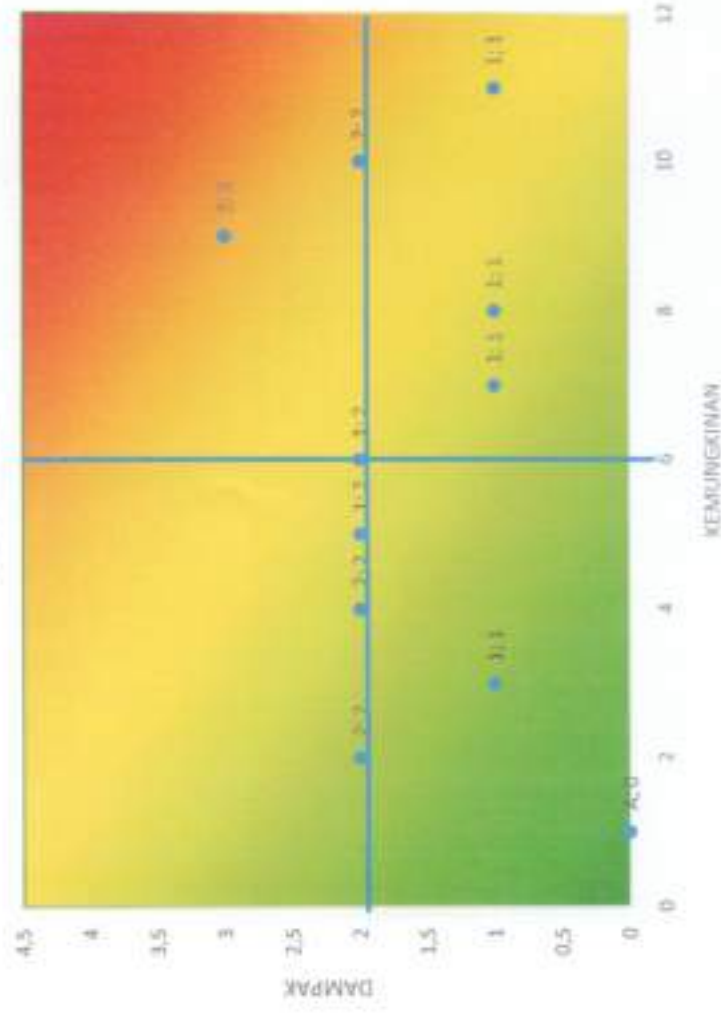
No	Program	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Tingkat Resiko
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan IKA tidak sesuai dengan target	2	2	4	Sedang
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kerusakan yang mungkin terjadi pada peralatan pengujian laboratorium lingkungan Terkendalanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Minimnya fasilitas pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan kewenangan kabupaten/kota	1 2 1	1 2 2	1 4 2	Rendah Sedang Sedang
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Bertudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan tidak mencapai target Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat tidak mencapai target Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH tidak mencapai target	1 1 1	2 1 1	2 1 1	Sedang Rendah Rendah

No	Program	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Tingkat Resiko
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah permintaan penyedotan Lumpur Tinja yang menurun	2	3	6	Tinggi
		Target capaian Persentase Pengelolaan Sampah sulit untuk dicapai	2	2	4	Sedang
		Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana pengangkutan lumpur tinja	1	1	1	Rendah

PETA RISIKO

X	Y
KEMUNGKINAN	DAMPAK
A	A
2	2
1	1
2	2
1	2
1	2
1	1
1	1
2	3
2	2
1	1

PETA RISIKO



FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

Dinas : Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

Lampiran III

NO	RISIKO	PENGENDALIAN					PEMILIK PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA URAIAN	E/KE/TE	CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil perhitungan IKA tidak sesuai dengan target	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang ditentukan, menyesuaikan dengan cuaca dan memastikan keselamatan	Draf SK Tim/ Panitia, Sarana Laboratorium Lingkungan DLH, Dokumen Anggaran, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.	Efektif		Memastikan jumlah sampel uji cukup untuk semua parameter perhitungan IKA, Koordinasi dengan Laboratorium Akreditasi di Banda Aceh untuk 2 parameter IKA	Kabid, P2KL	Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024	
2	Kerusakan yang mungkin terjadi pada peralatan pengujian laboratorium lingkungan	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pengujian Laboratorium Lingkungan	Draf SK Tim dan Manajerial, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan DLH, Dokumen Mutu, Dokumen Anggaran	Efektif		Pengadaan Peralatan Pengujian yang baru Laboratorium Lingkungan	Kabid, P2KL	Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024	
3	Terkendalanya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan sementara Limbah B3	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penyusunan Time Schedule, Standar Operasional Prosedur (SOP)	Draf SK Tim, Dokumen Anggaran	Efektif		Koordinasi dengan pihak DPMPTSP dan para pihak terkait, Berkolaborasi dengan Bidang P4LH DLH Kab. Pidie	Kabid, PSLB3PK	Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024	
4	Minimnya fasilitas pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan kawasan kabupaten/kota	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Draf SK Tim, Time Schedule, Dokumen Anggaran	Efektif		Koordinasi dengan pihak DPMPTSP dan para pihak terkait, Berkolaborasi dengan Bidang P4LH DLH Kab. Pidie	Kabid, PSLB3PK	Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024	

NO	RISIKO	PENGENDALIAN				CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN	PEMILIK/ PEMANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA	Uraian	E/ KE/ TE					
5	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Diaksanakan tidak	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Draf SK Tim, Time Schedule, Dokumen Anggaran	Efektif	6	Koordinasi dengan para pihak terkait	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024	9	10
6	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat tidak mencapai target	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Draf SK Tim, Time Schedule, Dokumen Anggaran	Efektif		Koordinasi dengan para pihak terkait	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024		
7	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH tidak mencapai target	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Draf SK Tim, Time Schedule, Dokumen Anggaran	Efektif		Koordinasi berkesinambungan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024		
8	Jumlah permintaan penyedotan Lumpur Tinja yang menurun	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik, Dokumen Anggaran	Efektif		Pendataan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja swasta dan data volume penyedotan, Pengawasan Internal,	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024		
		Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Efektif		Pendataan harsan, Pengawasan Internal	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024		
9	Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Sarana pengangkutan lumpur tinja	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP)	Daftar Harga, Brosur, HPS, Dokumen Anggaran	Efektif		Percepatan Pembuatan Paket SIRUP, Percepatan Pelaksanaan Eksekusi pengadaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Kabid. PSLB3PK	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024		



Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE
FIRMAN MAULANA, S.STP, MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19840901 200212 1 001